

Bersama Bupati, DPRD Bahas 5 Raperda untuk Demak Lebih Bermartabat, Maju dan Sejahtera



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Memasuki bulan kedua di 2022, DPRD Kabupaten Demak kembali menjalankan fungsi legislatifnya. Bersama Bupati dr Hj Eisti'anah, para wakil rakyat Kota Wali itu membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai bentuk kepastian hukum kebijakan pemerintahan daerah sebagaimana amanat undang-undang. Lima raperda dimaksud adalah Raperda tentang Pe-

netapan Desa, Raperda tentang Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, serta Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren. Serta Raperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung, dan Raperda tentang Kepala Desa.

Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet menyampaikan, latar belakang disusunnya Raperda Penetapan Desa yakni desa memiliki masing-masing kode wilayah yang disesuaikan Permenagri Nomor 58/2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

"Sesuai UU Nomor 6/2014 tentang desa dan PP Nomor 11/2019, disebutkan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan peraturan daerah," ujarnya, usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak de-

ngan agenda Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD, Senin (14/2).

Sedangkan mengenai Raperda tentang Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

Perumahan, Ketua Bapem-perda DPRD Kabupaten Demak H Marwan menjelaskan, penyelenggaraan perumahan yang layak, terjangkau, sehat dan harmonis dan berkelanjutan membutuhkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas

perumahan. Agar pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif perlu adanya penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah. Sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Kaitannya Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren dijelaskan, untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan yang jelas terhadap pondok pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasan. Yang mengakomodasi perkembangan aspirasi, dalam kerangka hukum yang terintegrasi dan komprehensif.

"Pengaturan yang jelas inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk membentuk," imbuh Mar-

wan.

Di sisi lain, Bupati dr Hj Eisti'anah menuturkan, pentingnya menyusun Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5/2015 tentang Kepala Desa yakni karena tahun 2022 di Kabupaten Demak terdapat 183 kepala desa yang berakhir masa baktinya. Pada saat sama negeri ini sedang dalam situasi pandemi, sehingga perlu disusun landasan kebijakan agar pemerintahan desa tetap berjalan pada saat sama tidak muncul kluster PilkaDes.

"Sedangkan mengenai Raperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung penyusunannya menindaklanjuti PP Nomor 16/2021, yang selaras dengan pembangunan daerah yakni menjadikan Kabupaten Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera," tandasnya. (Sji)



Juru bicara DPRD Kabupaten Demak, Muhamad Badarudin saat membacakan jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Santri dan TNI/Polri Gelar Apel Bersama



KR-Mulyawan.

Apel Bersama Santri dan TNI/Polri di Lapangan Karanggendang.

BOYOLALI (KR) - Untuk menanggulangi paham radikalisme dikalangan pondok pesantren (ponpes), Pemerintah Boyolali bersama TNI/Polri melakukan apel bersama dengan para santri di lapangan Karanggendang, Desa Penggung, Kecamatan/Kabupaten Boyolali. Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan mengatakan, apel bersama para santri milenial generasi tangguh, TNI dan Polri guna menangkal isu paham radikalisme dikalangan pondok pesantren. "Semua santri di Desa Penggung ini kami hadirkan. Apel santri ini untuk mengurangi isu-isu radikalisme di kalangan pondok pesantren," kata Wahyu Irawan, Senin (14/2). Dikatakan, para santri milenial generasi tangguh ini nantinya juga akan diberi pembekalan dari pihak TNI/Polri terkait penanggulangan paham radikalisme serta pemahaman tentang Covid-19 dari pihak Dinas Kesehatan," ujarnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali Letkol Arm Ronald F Siwabessy mengatakan, saat ini banyak beredar paham yang dianut kalangan anak muda ada yang benar mungkin juga keliru. Dan yang keliru ini akan mengancam integrasi bangsa dan negara Indonesia. "Perlu ada kegiatan seperti ini. Karena saat ini banyak paham paham ada yang benar dan juga ada yang keliru. Yang keliru itu tentu akan mengancam integrasi bangsa kita," jelasnya.

Ditambahkan, saat ini bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan penanggulangan virus korona, namun bangsa ini juga terus disibukkan dengan wabah lain yakni variab Omicron. Selain itu, paham radikalisme bisa dikatakan lebih berbahaya dari virus korona. "Kita sedang disibukkan oleh virus korona," katanya. (R-3)

RPH Kota Pekalongan Jadi Rujukan di Jateng

PEKALONGAN (KR) - Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekalongan kini menjadi rujukan pelaksana RPH yang representatif di wilayah Jateng. Sehingga tidak mengherankan, jika RPH setempat acapkali menerima berbagai kunjungan dari berbagai daerah, salah satunya dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Nikentri Meiningrum, Senin (14/2) mengaku jika dipilihnya RPH Kota Pekalongan karena telah menjadi rujukan di Provinsi Jateng sebagai pelaksana RPH yang representatif. Apalagi, tahun ini, Kabupaten Pati mendapatkan anggaran dari Pusat untuk membangun RPH yang representatif paling tidak seperti yang ada di Kota Pekalongan. "Untuk itu kami ke sini melakukan kajian, kemudian bisa mengaplikasikan pelayanan pemotongan hewan di wilayah Kabupaten Pati," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan Drs Muadi MSI, sangat mengapresiasi kunjungan tersebut. Bahkan bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan sharing pengoptimalan RPH. "Kami sangat mendukung dan berharap nantinya Pati, dapat memberikan pelayanan untuk menyediakan daging hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)," katanya.

Ditambahkan, jika memotong di RPH Kertoharjo ini dijamin daging yang dihasilkan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Apalagi di tahun 2022 ini untuk higienitas sanitasi sudah dibangun IPAL untuk membantu mencegah pencemaran lingkungan. Dengan begitu, tidak lagi terjadi pencemaran, karena limbahnya ditampung tidak dibuang sembarangan. (Riy)



KR-Riyanto DC

Kegiatan penyembelihan hewan di RPH Kota Pekalongan.

CANDI PRAMBANAN DAN CANDI BOROBUDUR

Bisa untuk Ibadah Umat Hindu dan Buddha

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, umat Hindu dan Buddha di dunia sekarang bisa beribadah di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Hal itu setelah Prambanan, Borobudur, beserta Candi Pawon dan Mendut disepakati untuk kembali dimanfaatkan sebagai tempat ibadah.

Demikian dikatakan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Senin (14/2). Dengan perkembangan tersebut, Ganjar Pranowo mengatakan sangat terharu dan bahagia. "Terharu betul melihat suasana wajah (umat Hindu dan Buddha) yang ceria, gembira. Bahkan tadi menyampaikan mereka langsung berdo'a karena

rasa bahagia itu," tutur Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar Pranowo, pemanfaatan keempat candi itu untuk kepentingan agama merupakan wujud nyata 'Berketuhanan Yang Maha Esa' dan menjalankan nilai Pancasila. Pemanfaatan itu juga sudah menjadi impian Ganjar Pranowo dan umat Hindu-Buddha sejak lama.

Bahkan pernah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Budiono yang waktu itu berkunjung ke Borobudur, tepatnya saat perayaan Waisak.

Ganjar Pranowo mengatakan hal itu merupakan impian sejak lama, dan Pemprov Jateng sebenarnya sudah pernah mencoba menyiapkan sejak awal. Apalagi umat Buddha

juga sudah pernah menyampaikan permintaan tersebut kepada Wakil Presiden secara langsung.

Ganjar Pranowo mengakui waktu permintaan untuk bisa menggunakan Candi Prambanan dan Borobudur serta beberapa candi lain untuk beribadah belum bisa seketika direalisasikan. Sehingga tahun ini menjadi sangat luar biasa karena impian itu dapat terealisasi. Namun itu semua bisa direalisasi setelah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Guber-

nur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Jumat (11/2) lalu.

"Kemarin kita sepakati untuk beberapa ruang yang ada di Borobudur, Prambanan, dan dua candi lain (Pawon dan Mendut) akan dipakai untuk tempat ibadah, khususnya bagi umat Hindu dan Buddha. Sekali lagi ini impian sejak lama dan hari ini secara formal semua sepakat merealisasikan," kata Ganjar Pranowo. (Bdi)

Binda Jateng Kembali Gelar Vaksinasi Anak

MAGELANG (KR) - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jateng, terus lakukan vaksinasi massal anak atau pelajar usia 6-11 tahun dan masyarakat di empat Kabupaten Provinsi Jateng dengan target peserta vaksin dalam kesempatan ini sebanyak 5.800 dosis. Empat kabupaten itu meliputi, Kabupaten Magelang, Wonogiri, Semarang dan Tegal.

Sementara jenis vaksin yang dipergunakan bagi anak atau pelajar yaitu jenis sinovac yang telah mendapatkan ijin dari BPOM untuk dipergunakan bagi anak atau pel-



KR - Bagyo Harsono

Pelaksanaan vaksinasi anak di SD Islam Al Firdaus Mertoyudan.

jar usia 6 - 11 tahun. Sedang untuk masyarakat, dilakukan secara 'door to door' (DTD) serta vaksi-

nasi booster menggunakan vaksin yang tersedia dari Dinas Kesehatan setempat.

"Binda Jateng dalam kesempatan ini, mendirikan empat sentra vaksinasi di kabupaten/kota. Adapun wilayah dengan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun meliputi, Kabupaten Wonogiri, Semarang, Tegal, dan Magelang, dengan target 4.100 dosis," kata Kepala BIN Daerah (Binda), Jateng Brigjen TNI Sondi Siswanto, Senin (14/2).

Brigjen TNI Sondi Siswanto menyampaikan jika vaksinasi DTD di Kabupaten Magelang, dilaksanakan di SD Islam Al Firdaus Kecamatan Mertoyudan. Untuk targetnya, 1.000 orang tervaksinasi

pelajar 200 dosis. Untuk Kabupaten Tegal dan Booster ada di Kabupaten Semarang, dengan target 500 dosis.

"Meski gejala Covid-19 Omicron terbilang ringan, angka penularan yang tinggi memicu kekhawatiran pemerintah. Karena itu pemerintah tetap merekomendasikan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar fasilitas kesehatan tidak dibanjiri pasien Covid," jelasnya.

Terlebih, Pemerintah juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak termanis informasi tidak benar atau hoax. (Bag)

Kasus Aktif Covid-19 di Magelang Mencapai 601

MAGELANG (KR) - Pasien terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Magelang, terus bertambah. Selama beberapa hari terakhir, ada penambahan cukup signifikan di sejumlah kecamatan di wilayah ini. Utamanya di kecamatan yang tingkat mobilitas warganya sangat tinggi. Diantaranya di Mertoyudan, Mungkid, Muntilan dan Borobudur. "Penambahan kasus terbanyak belakangan ini, memang sudah merata di hampir seluruh kecamatan di wilayah ini. Namun khusus di kecamatan yang tingkat mobilitas warganya sangat tinggi, penambahannya cukup signifikan. Diantaranya di Mertoyudan, Mungkid, Muntilan dan Borobudur," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, Senin (14/2).

Terkait hal itu, pihaknya minta semua pihak untuk bersama-sama kembali menegakkan protokol kesehatan (prokes) di manapun berada. Utamanya pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun atau memakai handsanitizer, jaga jarak, tidak membuat kerumunan dan mengurangi mobilitas. "Saat ini kalau tidak mendesak, tidak usah bepergian. Kalau pun terpaksa pergi, sampai dirumah baju yang dipakai langsung dicuci dan mandi. Jangan kontak dengan anggota keluarga terlebih dahulu," pintanya.

Disampaikan Nanda, sampai saat ini jumlah pasien terkonfirmasi mencapai 601 orang. Namun demikian, 551 orang diantaranya menjalani isolasi mandiri dirumah masing-masing. Sedang yang dirawat di rumah sakit, hanya 50 orang. "Saat ini, pasien yang dirawat dirumah sakit, hanya yang menunjukkan gejala. Kalau hanya terinfeksi tapi masih sehat atau OTG, kami rekomendasikan untuk isolasi mandiri dirumah saja," tegasnya.

Sejalan dengan itu, tingkat okupansi beberapa rumah sakit di wilayah ini masih mencukupi. Dari 105 tempat tidur (TT), saat ini baru terisi 46,15 persen. "Sebanyak 105 TT itu, 91 diantaranya merupakan ruang isolasi. Sisanya 14 merupakan ruang ICU. Namun kami tergaskan, meski penambahan pasien terkonfirmasi terus bertambah akhir-akhir ini, namun tingkat kematiannya masih sangat rendah," tandasnya. (Bag)

Mimbar Legislatif

Masyarakat Harus Aktif Laporkan Peristiwa Kependudukan

ANGGOTA Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie, mengatakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di setiap kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengelola dan meng-update data penduduk di setiap wilayahnya. Dengan data kependudukan yang valid, maka tersaji jumlah aktual dan faktual mengenai penduduk di daerah.



KR-Budiono Masruhan Samsurie.

Masruhan Samsurie mengatakan hal itu dalam 'Dialog DPRD Provinsi Jateng-Prime Topic' di Desa Wisata Keteleng Kabupaten Batang, akhir pekan lalu. Diakui kinerja pelayanan Disdukcapil di masing-masing kabupaten/kota sudah cukup baik. Banyak inovasi yang dilakukan sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan kepengurusan kependudukan. Pelayanan kepengurusan surat-surat terkait kependudukan sudah bisa dilayani baik melalui loket pelayanan maupun secara online untuk menghindari praktik percaloan. Pelayanan yang baik tersebut dapat terlaksana karena adanya dukungan dari masyarakat yang sudah sadar mengenai pentingnya administrasi kependudukan (adminduk).

Dari hasil pantauan Komisi A DPRD Jateng, pelayanan di Disdukcapil di daerah-daerah di Jateng sudah mengalami banyak

kemajuan dan masyarakat merasa diberi kemudahan. Masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan bisa langsung ke loket atau melalui online. Sudah tidak ada lagi calo.

Komisi A melihat hal itu merupakan kemajuan yang cukup bagus. Disamping itu, masyarakat juga sudah banyak yang mau melaporkan peristiwa kependudukan kepada Disdukcapil setempat, seperti pelaporan soal kelahiran dan kematian, masyarakat sudah banyak yang aktif melaporkannya secara langsung.

Muhammad Soleh selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Batang menyatakan, disdukcapil merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mencatat kejadian kependudukan. Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah peristiwa yang mengakibatkan perubahan data jumlah penduduk pada suatu daerah tertentu. Dalam praktiknya, Disdukcapil akan mencatat peristiwa kependudukan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang kemudian di update ke database pusat. (Disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)